

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Kekerasan struktural adalah kekerasan yang mempengaruhi hidup orang banyak tetapi tidak terlihat secara langsung dan memberikan dampak secara nyata terhadap kehidupan banyak orang. Contoh kekerasan struktural seperti misalnya korupsi, peredaran narkoba di lapas, pembiaran intoleransi beragama dan lain-lain. Kekerasan struktural di Indonesia memberikan dampak signifikan dalam kehidupan masyarakat. Bisa dilihat dari menurunnya tingkat toleransi dan demokrasi di Indonesia yang disebabkan pilihan politik lalu menjalar ke berbagai identitas.

Pemerintah dapat menjadi pelaku kekerasan struktural karena memiliki kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi hidup orang banyak. Menurut Galtung, sengaja atau tidak sengaja apabila menghasilkan kekerasan struktural itu berarti sama saja melakukan kekerasan karena dilihat dari sudut pandang korbannya. Kekerasan struktural yang bertransformasi menjadi kekerasan langsungpun tak dapat di hindarkan. Jemaah Ahmadiyah Indonesia merupakan salah satu contohnya. Masih ada lagi kasus Tanjung Balai, penyerangan Gereja, Terorisme, dan berbagai kasus lainnya. Semuanya memerlukan kehadiran pemerintah di tengah-tengah masyarakat. Tetapi apa yang dilakukan pemerintah justru melanggengkan kekerasan dan mengeluarkan kebijakan yang tidak solutif. Karena tertutup dan tidak membuka kesempatan dialog, sehingga hanya mendewakan kebenaran persepsinya.

Menilik pada sejarah, pada zaman kolonialisme dahulu ada sosok yang pemikiran dan ide-idenya tidak lekang oleh zaman dapat membantu merubah sudut pandang atau menangani masalah tersebut. Adalah seorang Mahatma yang berjiwa besar bernama Gandhi. Pemikirannya yang orisinal dan jujur berhasil menarik perhatian dunia dan membebaskan negaranya dari penjajahan tanpa melakukan peperangan.

Indonesia dapat belajar dari Gandhi tentang bagaimana membangun sebuah bangsa yang tidak hanya berdasarkan hasrat untuk merdeka. Tetapi juga memebangkitkan nilai-nilai yang tertanam dan membangun kepercayaan diri bangsa. Gandhi menekankan nasionalisme ketimuran yang mempunyai sifat religius dan anti kekerasan.

Pemikirannya tentang kebenaran dan anti kekerasan harusnya cocok diadopsi oleh Indonesia. Karena pemikiran tersebut lahir dari beragam dan banyaknya perbedaan juga. Bagi Gandhi, kebenaran adalah tujuan utamanya. Maka dari itu yang ia bisa ajarkakan untuk Indonesia adalah metodenya dalam menghadapi suatu masalah. Metodenya menitikberatkan pada kekuatan jiwa manusia. Bahwa manusia harus dipandang sebagai manusia yang unik dan mempunyai percikan Tuhan didalam tubuhnya. Pemecahan masalah dengan tanpa kekerasan adalah andalannya. Bahwa suatu kebijakan yang baik harus bersumber pada kebenaran yang harus membuka diri. Tidak tertutup pada pandangan kebenaran sendiri. Berdialog dengan kerendahan hati dan tanpa prasangka untuk mendapatkan kebenaran bersama. Melakukan sesuatu dengan integritas dan harus sesuai garis lurus pikiran, ucapan dan perbuatan.

Pemerintah tidak boleh mengeluarkan kebijakan misalnya hanya untuk menyengankan banyak orang ataupun hanya menyenangkan orang kaya. Pemerintah harus adil membuat kebijakan untuk menyenangkan semua orang. Gandhi menentang kebijakan utilitarianisme. Maka dari itu untuk menghadapi kekerasan struktural harus adanya integrasi antara pikiran, ucapan dan perbuatan.

5.2. Saran

Pemerintah harus lebih terbuka terhadap pemecahan suatu konflik. Tidak semestinya paranoid dan menutup ruang dialog. Pemerintah juga harus merubah sudut pandang dalam sebuah kebijakan. Bukan sebagai penguasa saja tapi kewajibannya juga melayani rakyatnya. Kekerasan struktural tak akan berakhir apabila pemerintah tidak mau mengevaluasi cara pandangnya.

Tidak boleh lagi melakukan pembiaran terhadap penderitaan kelompok minoritas apalagi mereka adalah warga yang taat pada hukum negara dan selalu membayar pajak. Mereka pantas mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara dilindungi oleh negara yang tertanam pada Undang-Undang Dasar 1945 tentang Hak Asasi manusia.